



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016



**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. LKjIP SKPD tahun 2016 merupakan wujud komitmen nyata Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam meningkatkan transparansi serta mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat dalam mengukur pencapaian kinerja atas target – target pembangunan yang telah ditetapkan selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan melalui LKjIP ini.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memperoleh gambaran atas implementasi Rencana Strategis (Renstra) kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Penetapan Kinerja (PK) yang dijabarkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang/UPT, serta sebagai bahan evaluasi atas hasil kebijakan yang telah dilaksanakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan kedepannya. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Semarang, Januari 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Dra. EMA RACHMAWATI, M.Hum

Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199008 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
E. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARPRAS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2016	11
C. PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2016	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016	14
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN	14
B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	21
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	22
BAB IV PENUTUP	27
A. TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN	27
B. PERMASALAHAN ATAU KENDALA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	28
C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	28
LAMPIRAN		
1. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)	30
2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DINAS KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2013	32

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan	5
Tabel 2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan	5
Tabel 3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin	5
Tabel 4. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki	6
Tabel 5. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki	6
Tabel 6. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016	13
Tabel 7. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-1	15
Tabel 8. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-2	17
Tabel 9. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-3	18
Tabel 10. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-4	19
Tabel 11. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-5	20
Tabel 12. Pengukuran Pencapaian Sasaran ke-6	21
Tabel 13. Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015	22
Tabel 14. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016	23
Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016	24

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 2013 - 2018 adalah "**Sejahtera bersama Koperasi dan UMKM**". Guna mewujudkan visi dimaksud, terdapat 8 (delapan) sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah
2. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah
3. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah
4. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM
6. Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
7. Meningkatnya kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
8. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur.

Dari 8 (delapan) sasaran tersebut, dijabarkan ke dalam 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Adapun hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari ke-14 indikator tersebut menunjukkan hasil kinerja yang **Amat Baik** (141,23%), serta terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.662.372.107,-. Penjelasan secara lengkap mengenai kinerja maupun realisasi penyerapan anggaran dapat dilihat pada Bab III.

Meskipun selama tahun 2016 upaya pembinaan dan pemberdayaan telah dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat KUMKM, yaitu :

1. Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja dan bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya pengurus/pengelola koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.
3. Jumlah aparatur pembina koperasi dan UMKM di daerah relatif terbatas, selain itu kapasitas dan dukungan sarana prasarana bagi aparatur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan juga kurang memadai.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah dimaksud adalah:

1. Mendorong peningkatan pemahaman masyarakat tentang keunggulan koperasi sebagai sarana perekonomian
2. Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pengurus/Pengelola koperasi dan UMKM
3. Mendorong komitmen Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan bagi koperasi dan UMKM melalui penyediaan dukungan sarana prasarana serta pelatihan bagi aparatur Pembina secara teratur.